



Dadang Solihin  
Rektor Universitas Darma Persada



# Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka-NTT  
Lynt Hotel-Jakarta, 16 Maret 2016

# Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka-NTT

## Jakarta, 16 Maret 2016





## DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.



Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus dengan pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com), HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

# Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN: Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi NTT
- Multilateral Meeting



# Siklus Manajemen Pembangunan





# Perencanaan Pembangunan Daerah

# Proses Perencanaan



## Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



## Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



## Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



## Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

# Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

# Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

# Syarat Perencanaan

**Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:**

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

# Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





# Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

BANDAR UDARA  
FRANS GEDA MAUMERE

# Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:

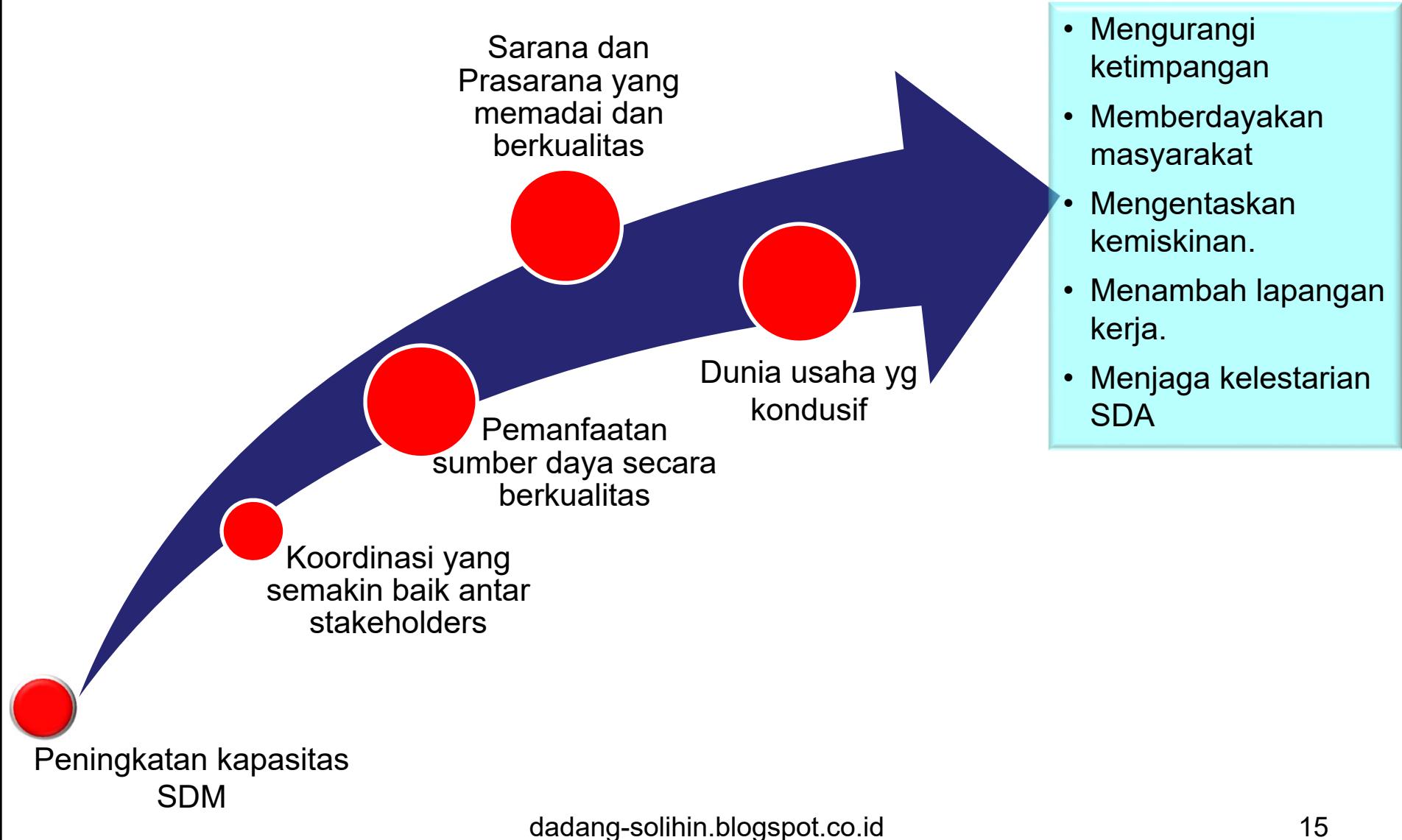
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

# How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
  - antar daerah
  - antar sub daerah
  - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

# Tantangan dalam Pembangunan Daerah



## PEMBANGUNAN DAERAH



## PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

# PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi  
Daerah

Pengelolaan  
Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.



# Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

# Apa itu RPJMD

- RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepertutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:
  1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
  2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

# Apa itu RPJMD

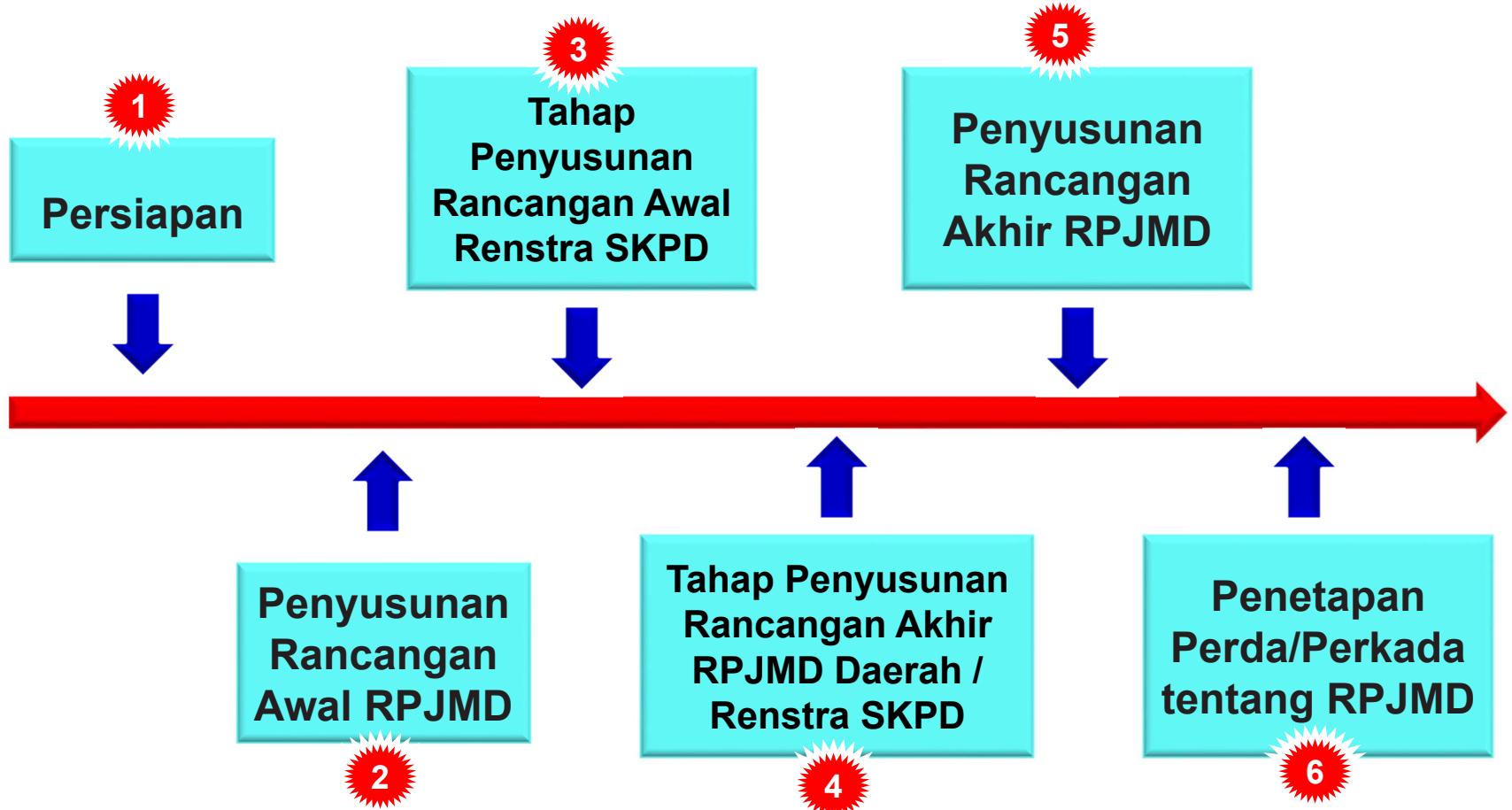
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

# **Substansi RPJMD**

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

# Step by Step Penyusunan RPJMD



# Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

# Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

# Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahannya)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

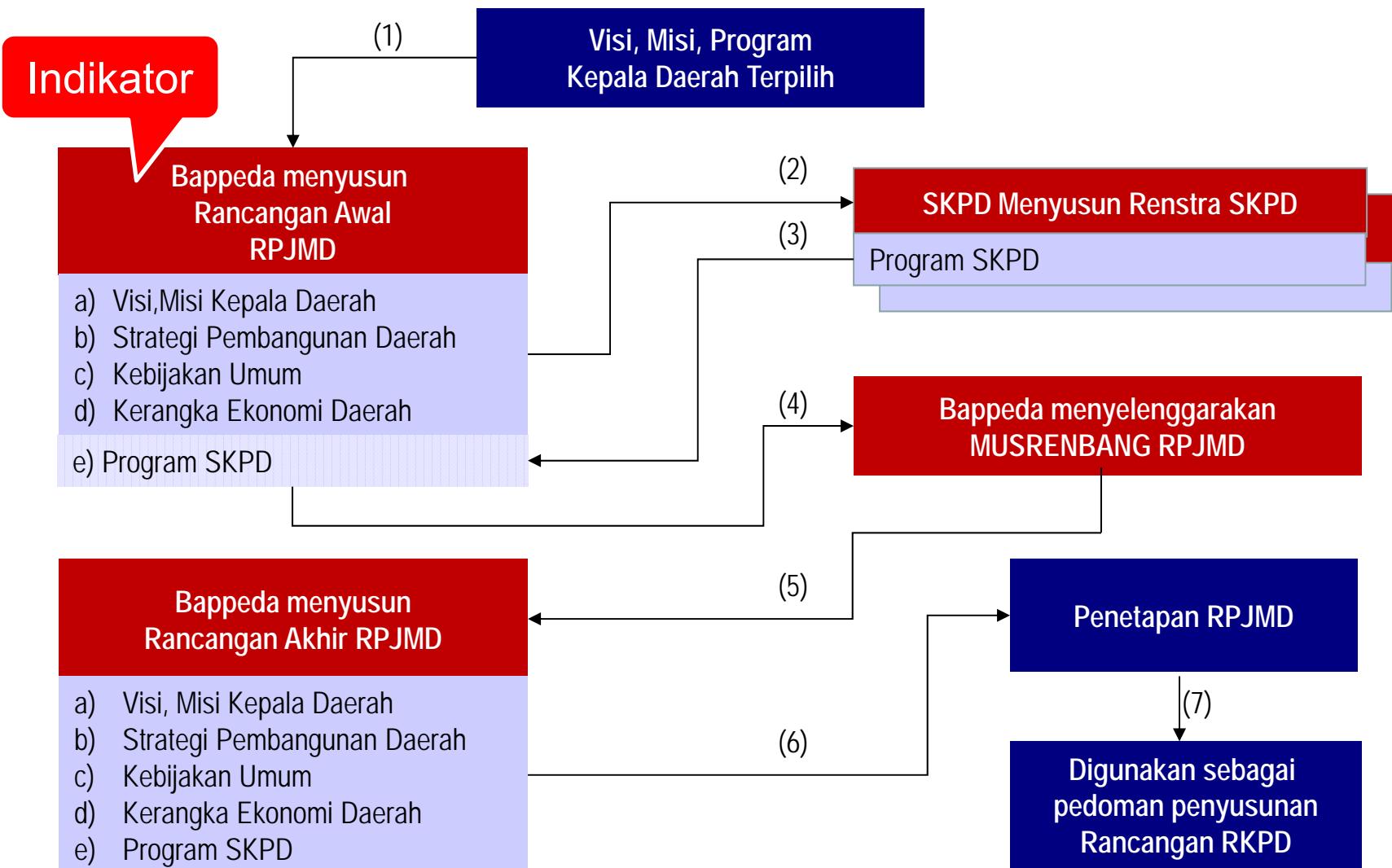
## Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

# Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

# Langkah Penyusunan RPJMD



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

### Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

- 2.1 Kondisi Geografis Daerah
- 2.2 Pelayanan Umum
- 2.3 Ketertiban dan Ketentraman
- 2.4 Ekonomi
- 2.5 Lingkungan Hidup
- 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
- 2.7 Kesehatan
- 2.8 Pendidikan

- 2.9 Pariwisata dan Budaya
- 2.10 Pendidikan
- 2.11 Perlindungan sosial
- 2.12 Keuangan Daerah
- 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

## Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

- 3.1 RPJM Nasional
- 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)
- 3.3 RPJM Provinsi
- 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota)

## Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Agenda (apabila ada)

## Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Strategi
- 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah)
- 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

## Bab VI Program Pembangunan Daerah

Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

- 6.1 Program Pembangunan
  - 6.1.1 Program SKPD
  - 6.1.2 Program Lintas SKPD
  - 6.1.3 Program Lintas Kewilayah

# Sistematika Penulisan RPJMD

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

## Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas *Non Government Stakeholders* untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

## Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

# Contoh: Outline RPJMD DKI

## BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Landasan Hukum
- Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- Kondisi Geografis
- Kondisi Demografi
- Sumber Kekayaan Alam
- Kondisi menurut Aspek Kehidupan
- Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

## BAB III VISI DAN MISI

- Visi
- Misi

## BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

- Tujuan Pembangunan Daerah
- Strategi Pembangunan Daerah
- Pendekatan

## BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

- Urusan Wajib
- Urusan Pemerintahan

## BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

- Umum
- Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- Arah Kebijakan Belanja Daerah
- Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

## BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Program Dedicated
- Program menurut Urusan Pemerintahan
- Program Kewilayahannya

## BAB VIII PENUTUP

# Evaluasi Kualitas RPJMD

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah   | ✓ . |
| 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah   | ✓ . |
| 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)</li><li>▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>)</li></ul> | ✓ . |

# Evaluasi Kualitas RPJMD

- |   |     |
|---|-----|
| 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)</li><li>▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>)</li></ul> | ✓ . |
| 5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.   | ✓ . |
| 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.  | ✓ . |

# Evaluasi Kualitas RPJMD

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah <u>sesuai dengan</u> rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Rumusan program pembangunan daerah <u>sesuai dengan</u> kendala fiskal daerah   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Kualitas RPJMD sudah SMART   | <input checked="" type="checkbox"/> |



# Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

# Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



# Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
<b>I. Sasaran Makro</b>				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

# Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	3.7	8.1	8.3	8.7	9.0
Nusa Tenggara Timur	6.0	6.2	6.8	7.6	9.5

# **Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi 2015-2019**

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	16.9	15.6	14.4	13.2	12.0
Nusa Tenggara Timur	18.4	17.0	15.7	14.3	12.9

# Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2
Nusa Tenggara Timur	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1



# **Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN**

## **Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi NTT**

# **PERHUBUNGAN DARAT**

<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Prov NTT</b>	<b>RPJMD Kab Sikka</b>
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Kupang*		

# **PERHUBUNGAN UDARA**

<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Prov NTT</b>	<b>RPJMD Kab Sikka</b>
1. Pengembangan Bandara Komodo 2. Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang		

# PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo 2. Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca 3. Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende 4. Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere 5. Pengembangan Faspel Laut Marapokot 6. Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk mendukung Pariwisata 7. Pembangunan Pelabuhan TenauKupang* 8. Pengembangan Pelabuhan Maritaing 9. Pengembangan Pelabuhan Baing 10.Pengembangan Pelabuhan P.Salura		

# **PERHUBUNGAN LAUT**

<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Prov NTT</b>	<b>RPJMD Kab Sikka</b>
11. Pengembangan Pelabuhan Kendidi/Reo 12. Pengembangan Pelabuhan Pota 13. Pengembangan Pelabuhan Maurole 14. Pengembangan Pelabuhan Atapupu 15. Pengembangan Pelabuhan Batutua 16. Pengembangan Pelabuhan Larantuka 17. Pengembangan Pelabuhan Terong 18. Pengembangan Pelabuhan Wulandoni 19. Pengembangan Pelabuhan Bari 20. Pengembangan Pelabuhan Ippi		

# JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Timor (Batuputih-Panite-Oinlausi-Boking-Motamasin) 2. Pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-Riung-Megapanda-Maumere) 3. Pembangunan Jalan Poros Tengah Kupang-Timor Tengah Utara (Oilmasi - Sulamo) 4. Pembangunan Jalan Waingapu-Melolo-Baing (P. Sumba) 5. Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste (Motomasin - Laktutus – Fatubesi – Dafala – Wedomu)		

# JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
6. Pembangunan Jalan Perbatasan Poros Utara NTT - Timor (Faenake – Inbate – Inbate; Saenam – Nunpo; Saenam – Oenaek – Noelelo) 7. Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - Eakun 8. Pembangunan Jalan Seba - Mesara 9. Pembangunan Jalan Terang - Bari - Kedindi 10. Pembangunan Jalan Lakafehan - Keliting - Wini – Sakato 11. Pembangunan Jalan Sp. Amol – Manamas 12. Pembangunan Jalan Manamas – Wini 13. Pembangunan Jalan Sp. Nurobo - Sp. Umasuker (Betun)		

# JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
14. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Soe – Kapan 15. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Kapan - Nenas - Sutual 16. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Sp. Tablolong - Oelalus – Oepaha 17. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Oepaha - Buraen - Teres – Rium 18. Pembangunan Jalan Waiwadan-Lite-Waewerang 19. Pembangunan Jalan Lato-Kawaliwu-Waiwio 20. Pembangunan Jalan Lewoleba-Loang		

# ASDP

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Hansisi 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakalang 3. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kajadoi 4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wairiang (P. Lembata) 5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante		

# ASDP

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maritaing*		
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waikelo*		
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pamana*		
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante*		

# KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLTMG Kupang Peaker 40 MW</li><li>2. PLTMG Maumere Peaker 40 MW</li><li>3. PLTG/MG Mobile PP NTT (Kupang) 30 MW</li><li>4. PLTU Timor 1 2x25 MW</li><li>5. PLTP Mataloko (FTP 2) 20 MW</li><li>6. PLTMG Waingapu 10 MW</li><li>7. PLTMG Alor 10 MW</li><li>8. Pengembangan PLT Energi Arus Laut (Pilot Project)</li><li>9. Pengembangan EBT Sumba Iconic Island</li><li>10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi</li></ol>		

# TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

# **SUMBER DAYA AIR**

<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Prov NTT</b>	<b>RPJMD Kab Sikka</b>
1. Pembangunan Bendung Linamnutu D.I. Bena Kab. TTS 2. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng ( 1.225 Ha) Kab. Manggarai Timur 3. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Mbaiting Kab. Sumba Timur 4. Pembangunan Waduk Raknamo Kab. Kupang 5. Pembangunan Waduk Jawa Tiwa (Multi Years) Kab. Nagekeo		

# PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan untuk mencapai target pemerataan dan jangkauan pendidikan sebaiknya mempertimbangkan persoalan karakter wilayah, potensi wilayah, dan keunggulan lokal., Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah, Keterpaduan/sinergi pembangunan antar sektor terutama pada daerah yang terisolir</li><li>2. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk SATAP SMP-SMA, termasuk perpustakaan dan laboratorium</li><li>3. Meningkatkan jaminan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat</li></ol>		

# KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan sosialisasi dan advokasi KB berbasis desa</li><li>2. Penyediaan tenaga PLKB bagi daerah dengan TFR yang tinggi</li><li>3. Pembangunan KB harus dilakukan secara terpadu lintas sektor</li><li>4. Peningkatan alokasi untuk program KB</li><li>5. Peningkatan alokasi dana untuk mendukung upaya kesehatan promotif dan preventif dengan basis Posyandu</li><li>6. Peningkatan pelayanan 1000 hari pertama kehidupan balita dan anak, terutama pada wilayah rawan gizi.</li></ol>		

# KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
<ul style="list-style-type: none"><li>7. Peningkatan pelayanan kesehatan gugus pulau terutama pulau-pulau berpenghuni terisolir</li><li>8. Peningkatan eliminasi Malaria di wilayah endemis</li><li>9. Pengembangan sistem rujukan regional</li><li>10. Peningkatan rasio tenaga kesehatan, terutama untuk daerah yang jarang penduduknya</li><li>11. Peningkatan layanan kualitas kesehatan melalui sistem Sister Hospital</li><li>12. Peningkatan dukungan pengembangan Fakultas Kedokteran UNDANA</li><li>13. Dukungan pembangunan Rumah Sakit regional di Kupang, Waingapu, dan Maumere/Ende</li></ul>		

# PERUMAHAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Bantuan stimulan pembangunan/ peningkatan kualitas rumah swadaya layak huni		



# Multilateral Meeting

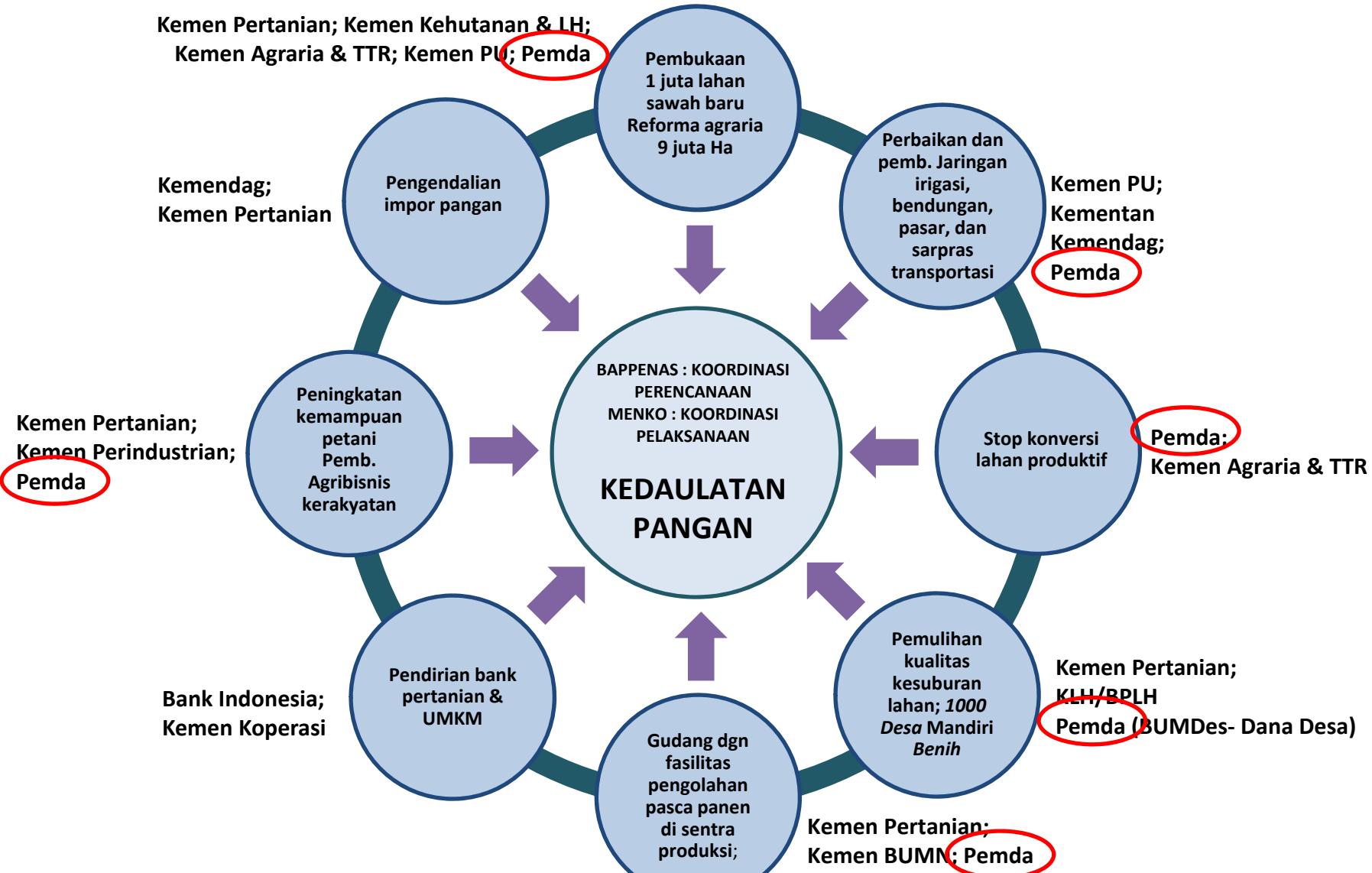


# Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

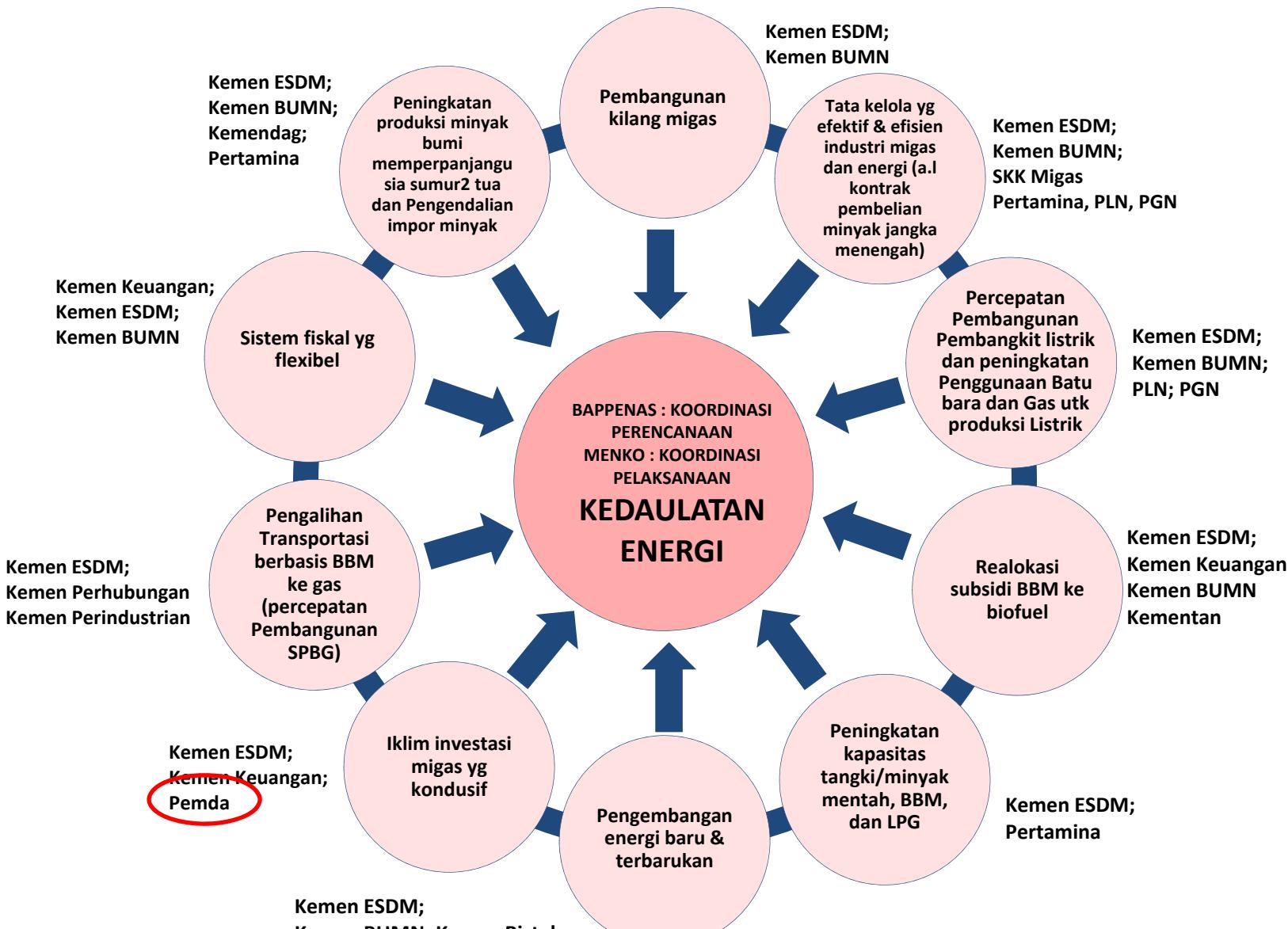
- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
  1. Kedaulatan pangan
  2. Kedaulatan energi
  3. Kemaritiman
  4. Industri/Kawasan Industri
  5. Pariwisata
  6. Revolusi mental
  7. Pembangunan Daerah Tertinggal



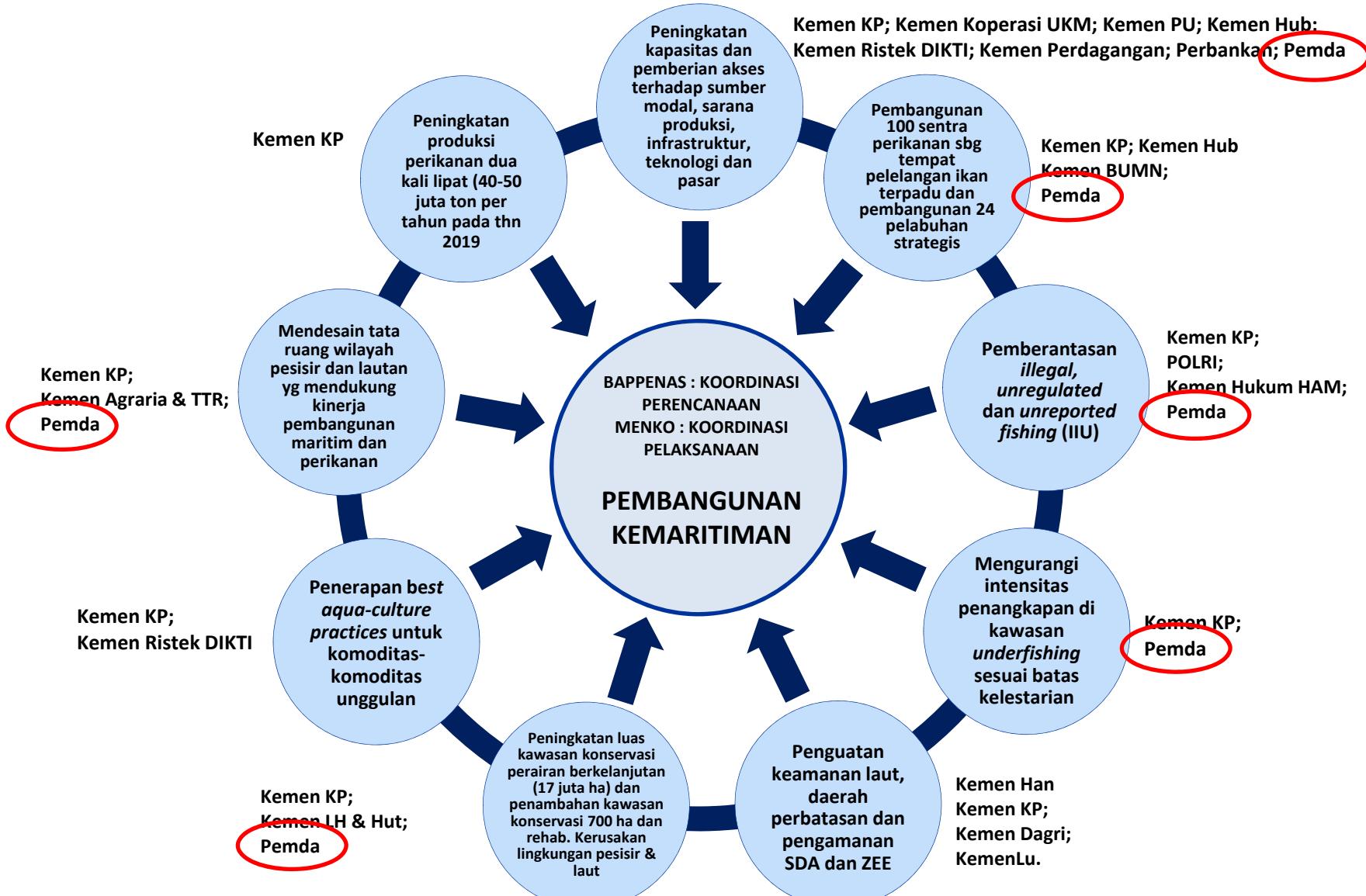
# 1. Kedaulatan Pangan



## 2. Kedaulatan Energi



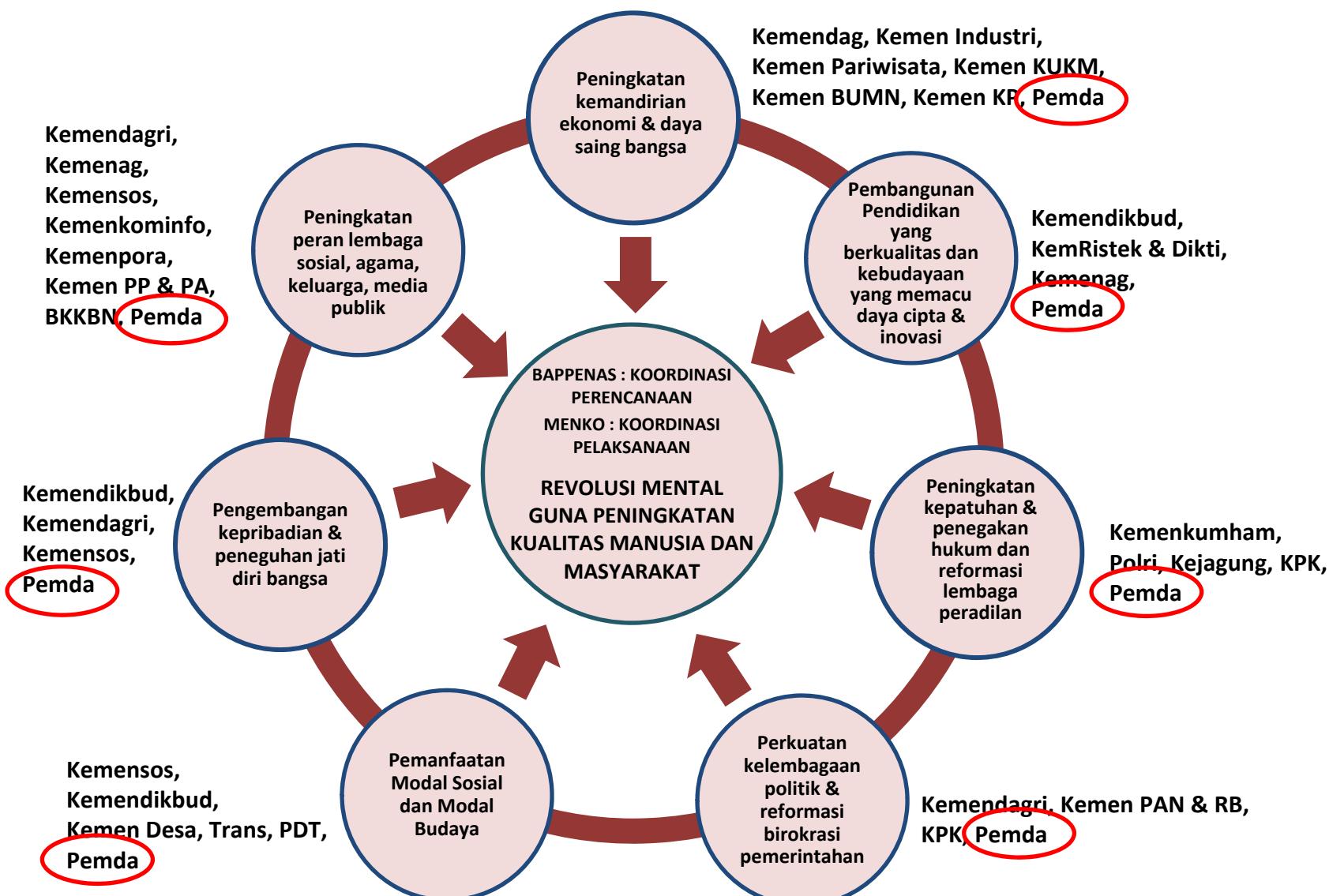
### 3. Kemaritiman



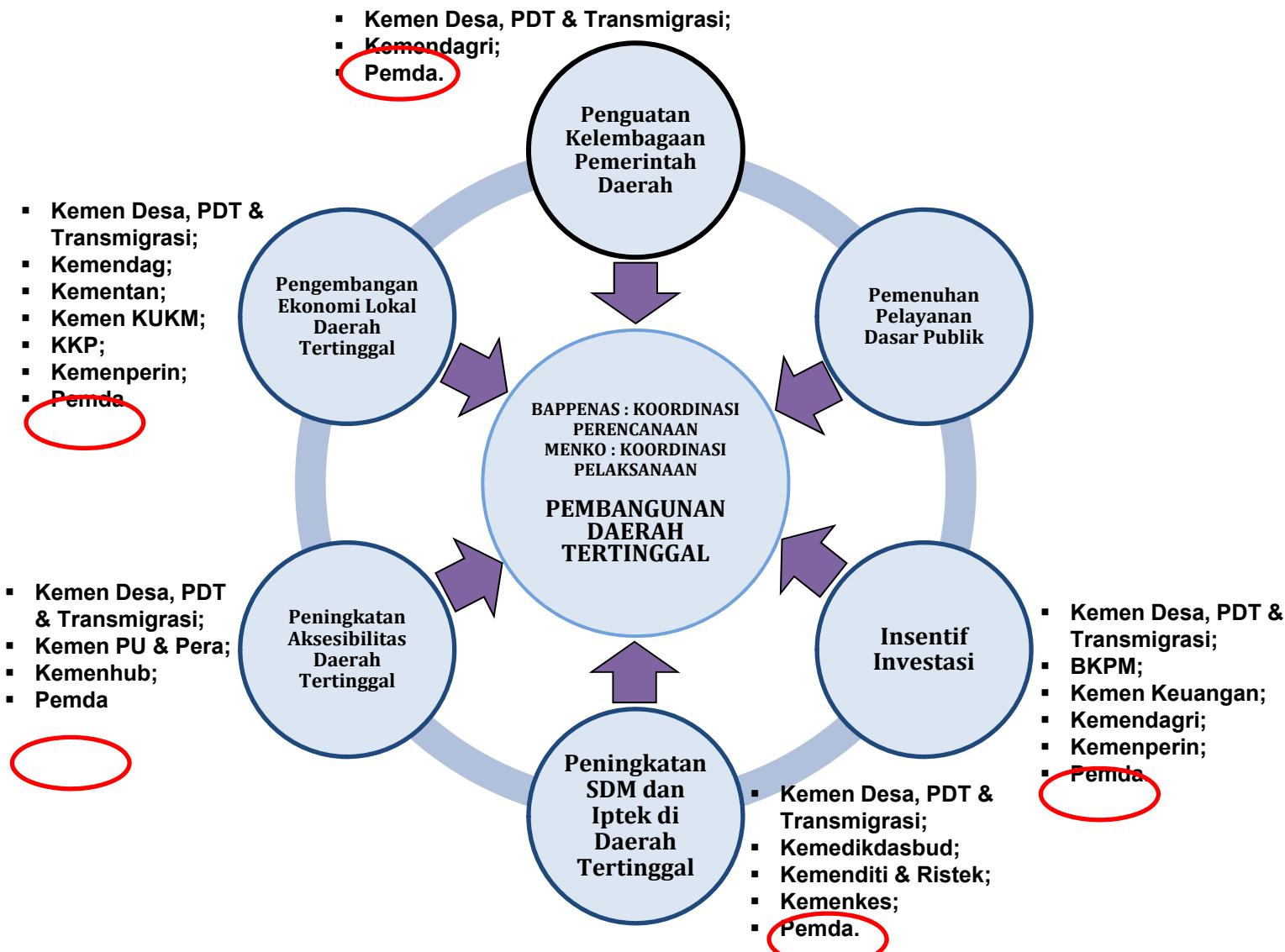
# 5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



# 6. Revolusi Mental



# 7. Pembangunan Daerah Tertinggal



# Terima Kasih

